

TATA KELOLA KEUANGAN

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

Kerukunan Keluarga Kawanua memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus ini dalam hal keuangan menimbulkan model tata kelola keuangan yang khusus pula. Akuntabilitas keuangan KKK akan bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, yang harus dikembangkan secara spesifik sesuai dengan karakteristik khusus KKK.

Penaksiran risiko dan penentuan aktivitas pengendalian akan menjadi kunci utama bagi pengembangan sebuah sistem pengendalian internal. Selain itu, akuntabilitas keuangan KKK juga akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung kinerja pengelolaan yang lain, yaitu :

- a. sumberdaya manusia,
- b. infrastruktur dan perangkat pengelolaan keuangan.

Keseluruhan akuntabilitas keuangan KKK semua harus dipahami dan dikembangkan secara sistematis, sebagai salah satu upaya mempertahankan karakteristik Tata Kelola Keuangan Kerukunan Keluarga Kawanua memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis dan juga organisasi nirlaba lainnya.

Perbedaan tersebut ada pada cara organisasi memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Kerukunan Keluarga Kawanua memperoleh sumberdaya dari sumbangan donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan yang menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keuangan, perlakuan akuntansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan organisasi bisnis seperti Perseroan Terbatas dan lainnya.

Transaksi Keuangan Kerukunan Keluarga Kawanua terdapat jenis transaksi penerimaan sumbangan yang jarang atau bahkan tidak ada dalam entitas bisnis.

Tahapan operasi Transaksi Keuangan KKK dimulai dari penerimaan dana dari penyumbang dan diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan prosedur prosedur pemberian dan pertanggungjawaban uang muka sebagai prosedur keuangan utama dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan.

Pada Sisi akuntansi, Keuangan KKK secara umum mengambil kebijakan konservatif dengan memandang kontrak hibah dari lembaga donor sebagai 'kontrak sosial' yang walaupun kontrak hibah menyebutkan jumlah kesepakatan hibah tertentu, namun perlakuan akuntansi hanya akan membukukan pendapatan pada saat dana benar-benar diterima dan sebesar jumlah penerimaan tersebut. Dengan begini maka KKK kemudian harus menggunakan metode pencatatan berbasis kas yang dimodifikasi (cash basis modified).

Akuntansi KKK juga memisahkan aset menjadi beberapa kategori berdasarkan pembatasannya, yaitu aset dengan pembatasan permanen, pembatasan temporer dan aset yang tidak dibatasi. berdasarkan pada pemahaman atas jenis karakteristik sumbangan yang diterima oleh KKK, maka disajikan dalam bentuk

TATA KELOLA KEUANGAN

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

laporan aktivitas keuangan yang merangkum pendapatan dan beban organisasi pada periode waktu tertentu.

salah satu pengguna utama laporan keuangan KKK adalah para donator yang dalam hal ini menjadi informasi peruntukan keuangan sebagaimana bersesuaian dengan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh KKK. Para penyumbang membutuhkan informasi keuangan yang mampu mereka gunakan untuk memeriksa kembali berapa dana yang diterima KKK dari penyumbang, berapa yang telah digunakan dan kesesuaian peruntukan atas penggunaan dana tersebut. Walaupun secara umum informasi keuangan yang dibutuhkan para penyumbang juga mensyaratkan format laporan tertentu yang bisa mereka gunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan penyumbang masing-masing.

Standar pelaporan keuangan di Indonesia, secara organisasi (Kerukunan Keluarga Kawanua (bukan hanya per proyek ataupun per donor) mengacu kepada aturan yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang disahkan pada 23 Desember 1997 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2000.

Dengan Mekanisme Pelaporan Keuangan merujuk kepada PSAK 45 tersebut, maka sistim keuangan KKK dalam hal laporan bergantung kepada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan KKK, yang seharusnya dikembangkan secara spesifik sesuai dengan karakteristik khusus dari berbagai program kegiatan KKK.

Hal hal tersebut antara lain:

Sistem Pengendalian Internal KKK

Sistem pengendalian internal KKK pada dasarnya meliputi pengorganisasian, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan, mendorong efisiensi dan dipenuhinya kebijakan manajemen sebagai kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat dan memastikan bahwa pelaporan telah dipatuhi sebagaimana mestinya yang berdampak kepada akuntabilitas keuangan organisasi KKK mampu mengendalikan operasi keuangan internal organisasi secara efisien dan efektif, sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

Pengendalian operasi organisasi akan dibangun berbasis sistem pengendalian internal, yang memiliki lima komponen utama pembentuk kerangka pengendalian, yaitu

- a. Lingkungan pengendalian,
- b. Penaksiran risiko,
- c. Aktivitas pengendalian,
- d. Informasi dan komunikasi,

TATA KELOLA KEUANGAN

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

e. Pengawasan.

Tiga poin awal adalah hal hal yang menjadi pemetaan dari pengendalian internal KKK sekaligus menjadi barometer dalam menaksir resiko pengendalian dan bermuara kepada tata Kelola dan aktivitas keuangan KKK yang tentunya dinamis mengikuti situasi dan kondisi dari para donator KKK.

Bentuk pengendalian keuangan di KKK meliputi keseluruhan sikap yang ada baik ditingkat Pengurus, Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan dan terutama kepada Stakeholder yang adalah Perkumpulan Kampung, Perkumpulan Taranak, Perkumpulan Fungsional dan Dewan Pimpinan Daerah atau Wilayah dan DPC, yang akan mempengaruhi nilai, gaya operasi, struktur organisasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab serta kebijakan dasar organisasi lainnya.

Didalam mekanisme pengendalian internal yang berhubungan dengan Penaksiran risiko pada KKK, akan mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan KKK dalam operasi pencapaian tujuan program KKK, yang berdampak kepada Resiko yang relevansinya pada resiko umum dan resiko bawaan lasimnya antara lain adalah resiko likuiditas, resiko pengelolaan kurs, dan resiko operasional keuangan lainnya seperti mismanajemen, kesalahan dan penipuan/manipulasi dan juga resiko bawaan terkait dengan KKK yang merupakan organisasi berbasis seni dan budaya Minahasa yang beranggotakan perantauan asal Minahasa.

Risiko bawaan yang terkait dengan karakteristik khusus KKK antara lain resiko pengelolaan arus kas, dimana KKK hanya mengandalkan penerimaan dimuka (advance) dari donatur untuk membiayai baik operasional maupun program yang telah ditentukan atau disepakati oleh DPP disetiap bidang organisasi, dan jenjang organisasi, yang seringkali terdapat jeda waktu antara penerimaan dan pemeriksaan serta pelaporan dari pengelolaan penerimaan kepada para donatur, yang berakibat kepada munculnya peminjaman antar program kegiatan dalam KKK.

Salah satu dari resiko sistim keuangan yang tidak baik pada KKK adalah minimnya pelaporan dari organisasi kepada para donatur dengan menggunakan kaidah kaidah akuntabilitas keuangan.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan risiko yang dapat ditaksir antara lain adalah:

- a. Perubahan lingkungan operasional organisasi KKK,
- b. Perubahan struktur KKK atau komposisi personel KKK,
- c. Perkembangan sistem dan teknologi informasi,
- d. Pengembangan aktivitas dan wilayah operasi baru,
- e. Terbitnya standar tata laksana organisasi atau tupoksi baru.

Aktivitas pengendalian yang merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin arahan manajemen dilakukan menghadapi risiko yang telah ditaksir yaitu dengan aktivitas pengendalian dengan cara:

TATA KELOLA KEUANGAN

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

- a. Pemisahan tugas yang jelas dan tegas
- b. Otorisasi yang tepa tatas transaksi dan aktivitas program organisasi
- c. Adminitrasi pendokumentasian
- d. Pencatatan yang memadai,
- e. Pengawasan dan pencatatan asset
- f. Pemeriksaan independent atas kinerja tata Kelola keuangan organisasi

Kebijakan dan prosedur pengendalian inilah yang biasa disebut dengan SOP Keuangan atau Sistem Pengelolaan Keuangan. Sistem adalah himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Atau juga bisa diartikan: sekelompok elemen yang

independen namun saling terkait sebagai satu kesatuan. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, yang disebut subsistem. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi, dengan definisi prosedur sebagai suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang .

Sebagai pondasi utama akuntabilitas keuangan KKK, tuntutan terbangunnya sistem pengendalian internal yang andal merupakan kebutuhan yang penting dan mendasar. Akuntabilitas keuangan merupakan pusat simpul ikatan kepercayaan para penyumbang kepada KKK dan kepercayaan para penyumbang yang kemudian diterjemahkan sebagai dukungan pendanaan hingga kini masih menjadi sumberdaya utama (untuk tidak menyebutnya satusatunya') bagi KKK dalam upaya pencapaian tujuannya.

Selain sistem pengendalian internal yang memadai, akuntabilitas keuangan KKK juga akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung kinerja pengelolaan yang lain, yaitu sumberdaya manusia, infrastruktur dan perangkat serta standar dan peraturan yang terkait, khususnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kebijakan Ketua Umum.

Standar dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba sangat spesifik. KKK dan para penyumbang selalu akan menyepakati sederet aturan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akan menjadi lampiran dari perjanjian kerjasama pada saat penandatanganan dokumen kesepakatan bersama. Walaupun secara umum, semua penyumbang memiliki persyaratan dasar dan prinsip prinsip yang sama, namun detail persyaratan dan aturan pengelolaan dan pelaporan keuangan masing-masing penyumbang dapat sangat bervariasi.

kebutuhan penyusunan laporan keuangan Yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan KKK yang berbadan hukum semakin mempertegas untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, khususnya kepada

TATA KELOLA KEUANGAN

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

para penyumbang dan anggota KKK yang merupakan organisasi perkumpulan Kampung, Perkumpulan Keluarga dan Perkumpulan Fungsional.

Apalagi bila KKK mengelola atau mendapatkan penyumbang menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dalam dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala antara lain adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja serta informasi mengenai laporan keuangan organisasi. UU Yayasan dan UU Keterbukaan Informasi Publik mensyaratkan laporan keuangan organisasi nirlaba disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yaitu PSAK 45, tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang diterbitkan IAI dan mulai berlaku efektif per tahun 2000.

Dari Sisi perpajakan, KKK pun memiliki kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. KKK dan staf organisasi merupakan 'subjek pajak penghasilan'. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan, dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan definisi 'objek pajak penghasilan' adalah tambahan kemampuan ekonomis, dalam bentuk apa pun, termasuk

- (a) imbalan jasa yang diterima gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- (b) laba usaha;
- (c) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Di samping jenis objek pajak penghasilan, beberapa bentuk penerimaan yang dikategorikan sebagai 'bukan objek pajak penghasilan' adalah

- (a) bantuan, sumbangan,
- (b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah satu derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KKK wajib tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku meskipun bantuan ataupun sumbangan yang diterima oleh KKK merupakan bentuk penerimaan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Beberapa kewajiban terkait pajak penghasilan yang terkait dengan KKK adalah PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal Badan (Pasal 25 dan Pasal 29). PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan bagi subjek pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan bagi subjek pajak badan yang berupa fee jasa (jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain) dan sewa selain tanah dan/atau bangunan. PPh Pasal 26 adalah pajak bagi subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan. PPh Pasal 4 ayat (2) yang terkait adalah pajak atas penghasilan persewaan tanah dan/atau bangunan.

TATA KELOLA KEUANGAN

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

KKK memang belum memiliki jumlah personel secara ideal pada bagian keuangan untuk memenuhi persyaratan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan kedepan tugas dan fungsi dari bidang Kebendaharaan dan Keuangan KKK sudah dapat melaksanakan tupoksi yang berhubungan dengan Akuntabilitas Keuangan KKK yang diterjemahkan terutama dalam bentuk SOP Keuangan, faktor kelengkapan personel dan kapasitas sumberdaya manusia serta ketersediaan perangkat pengelolaan juga akan sangat mempengaruhi tingkat kinerja pengelolaan keuangan.

Keterbatasan personel, keterbatasan anggaran pendukung seringkali menjadi kendala diberlakukannya sistem pengendalian internal, atau belum menjadi prioritas KKK.

Perangkat pengelolaan keuangan yang sangat dibutuhkan KKK saat ini adalah perangkat pencatatan/akuntansi. Perangkat ini berguna untuk menjamin akurasi, keandalan dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan KKK sesuai dengan PSAK 45. Karena karakteristik pelaporan keuangan KKK yang spesifik tidak dapat sepenuhnya menggunakan perangkat akuntansi (accounting software) entitas bisnis yang banyak beredar di pasaran.

Sampai saat ini, Perangkat Akuntansi KKK masih menggunakan menggunakan perangkat terotomatisasi dan masih menggunakan program spreadsheet MS Excel sebagai alat bantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi. Aplikasi perangkat akuntansi ini jelas-jelas akan sangat tergantung pada pemahaman personel keuangan organisasi atas alur akuntansi secara utuh dan kemampuan teknis personel tersebut dalam mengoperasikan jenis perangkat akuntansi tertentu.

Pemetaan Kapasitas Tata Kelola Keuangan Kerukunan Keluarga Kawanua.

Pemetaan terbatas atas kapasitas pengelolaan keuangan KKK perlu dilakukan, Pemetaan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkini atas kondisi pengelolaan keuangan KKK, mengidentifikasi kesenjangan kapasitas yang ada serta menemukan solusi yang paling mungkin dilakukan saat ini bagi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan KKK.

Program KKK tidak hanya bertujuan sebagai alat penggalangan dana, namun juga sebagai alat intervensi program dan perluasan gerakan. Sehingga perlu diperkuat dengan sistim:

Penganggaran

proses dan periode penganggaran dan keterlibatan seluruh komponen organisasi. Proses penganggaran biasanya dilakukan bersamaan dan menjadi bagian dari perencanaan strategis atau perencanaan tahunan organisasi. Penyusunan proyeksi arus kas sebagai turunan dokumen anggaran dilakukan secara periodik. proses evaluasi dan revisi anggaran secara periodic.

Apakah anggaran KKK dapat dibuat secara mandiri?

TATA KELOLA KEUANGAN

KERUKUNAN KELUARGA KAWANUA

Seberapa jauh ketergantungan KKK kepada para penyumbang dalam proses perencanaan program dan anggaran KKK?

Apakah anggaran masih sekadar menjadi kelengkapan proses perencanaan program?

Apakah Anggaran KKK dapat menjadi instrumen pengelolaan keuangan yang strategis?

Struktur Pengelolaan

Apakah Personal pada struktu keuangan KKK sudah the right man in the right place? Apakah pada struktur pengelolaan keuangan telah mencerminkan secara tegas pemisahan fungsi kelola pada unit keuangan KKK? (bila ada unit usaha selain dari penggalangan dana dari penyumbang?)

Apakah fungsi otorisasi dan pengawasan mekanismenya didasarkan pada persetujuan transaksi pengeluaran dana dan review atas laporan keuangan? atau mengacu pada hierarki organisasi masing-masing dengan titik berat keterlibatan pengurus/pelaksana pada transaksi penyumbang?